ISU-ISU STRATEGIS DAN AGENDA PEMBANGUNAN RT RPJMN 2020-2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Konsultasi Pusat RPJMN 2020-2024
Jakarta, 24 Juli 2019

ARAHAN PRESIDEN

ARAHAN PRESIDEN TERPILIH*

Pembangunan Infrastruktur	Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan
Pembangunan SDM	Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi
Mendorong Investasi	Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya
Reformasi Birokrasi	Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga
Penggunaan APBN	Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

*) Disampaikan pada pidato Visi Indonesia di Sentul, Jawa Barat, 14 Juli 2019

ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

URGENSI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

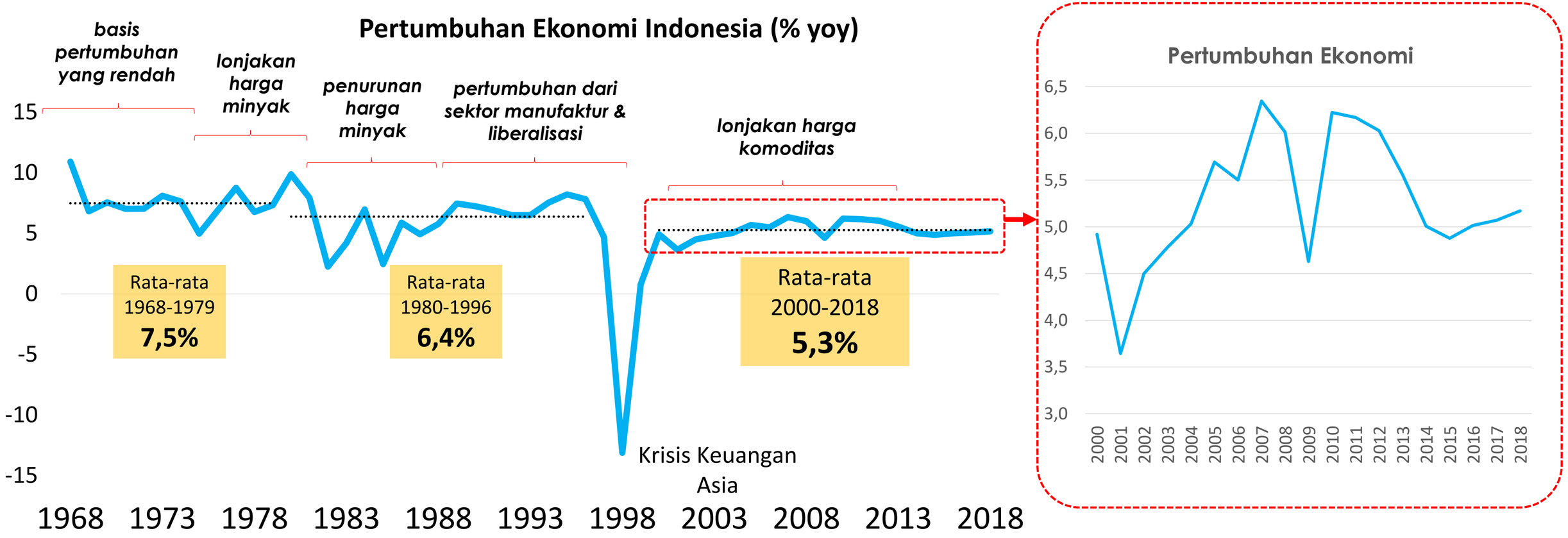

Sumber: BPS, CEIC (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia **melambat dan cenderung stagnan**

Memerlukan **upaya ekstra** untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi Indonesia

PENGHAMBAT UTAMA EKONOMI TUMBUH TINGGI

Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Ilustrasi Gentong Air)

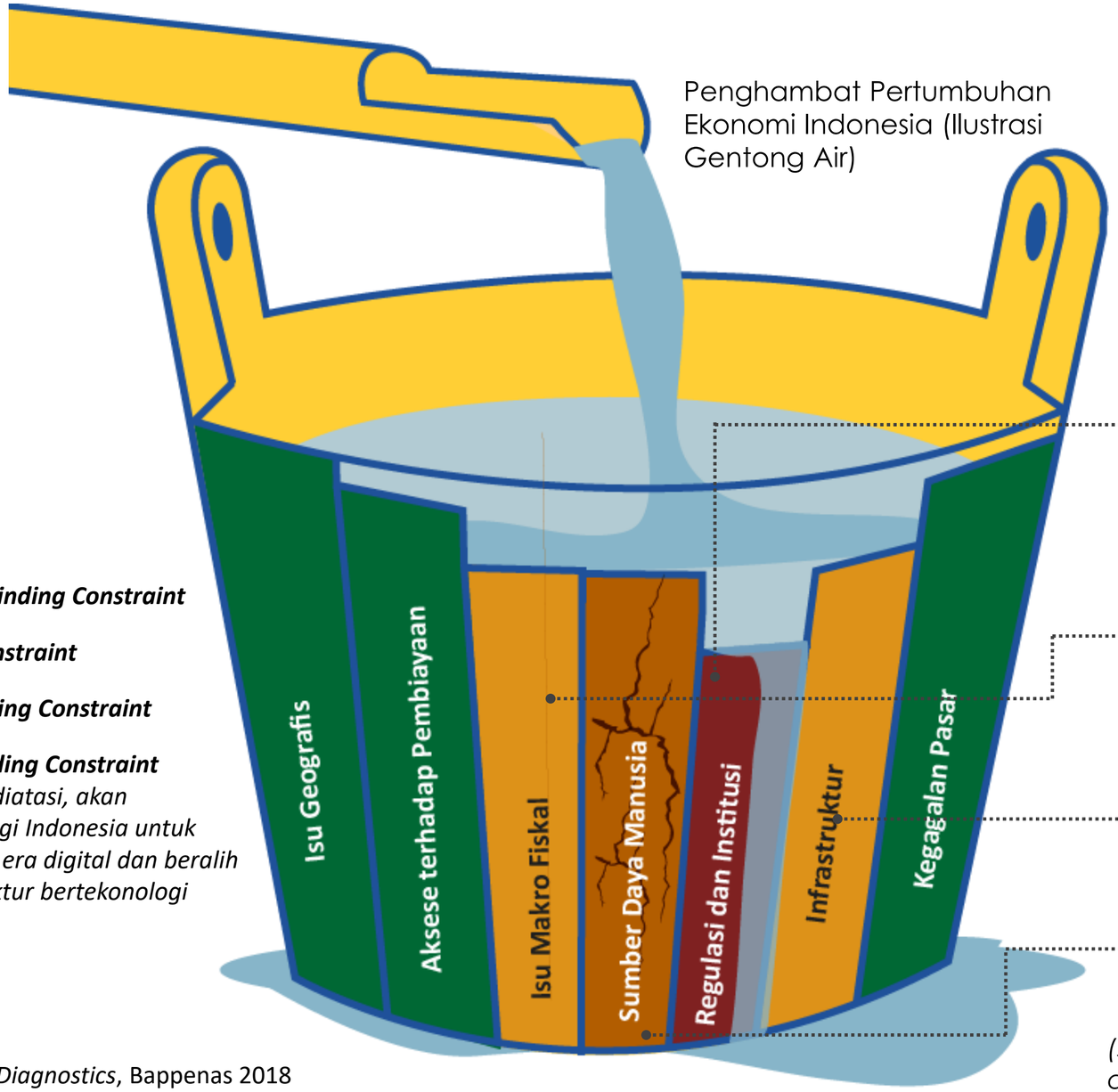

The Most Binding Constraint

Binding Constraint

Bukan Binding Constraint

Future Binding Constraint
(Jika tidak diatasi, akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur bertekonologi tinggi)

Regulasi dan Institusi adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi

- **Regulasi** tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, khususnya pada regulasi:
  - Tenaga kerja
  - Investasi
  - Perdagangan
- Kualitas **institusi** rendah
  - Korupsi tinggi dan birokrasi tidak efisien
  - Lemahnya koordinasi antarkebijakan

Fiskal:
Rendahnya penerimaan perpajakan

Infrastruktur:
Kurang memadai, utamanya konektivitas

Sumber Daya Manusia adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang

(Jika tidak diatasi saat ini, akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur berteknologi tinggi)

*Studi *Growth Diagnostics*, Bappenas 2018

REGULASI TENAGA KERJA

Tingginya biaya pesangon di Indonesia menyebabkan perusahaan cenderung **merekrut tenaga kerja kontrak dan tidak berinvestasi pada pengembangan tenaga kerjanya melalui pelatihan.**

Untuk memberhentikan seorang pekerja di Indonesia dibutuhkan biaya…

2 kali lebih tinggi dibandingkan **Turki**

4 kali lebih tinggi dibandingkan **Brazil**

6 kali lebih tinggi dibandingkan **Afrika Selatan**

Sumber: Global Innovation Index 2018, diolah

Kurang dari **10%** perusahaan di Indonesia memberikan pelatihan formal, dibandingkan dengan...

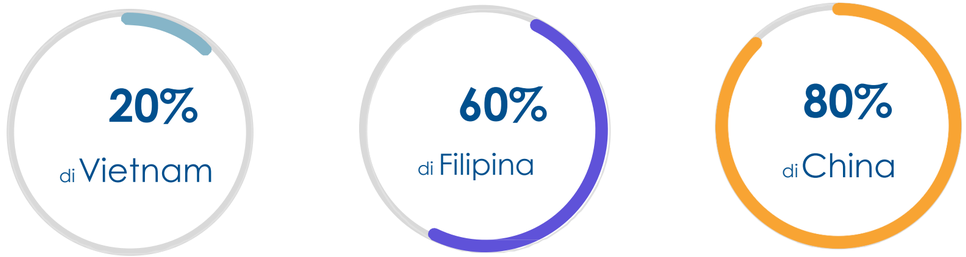

Sumber: World Bank Enterprise Surveys

Tenaga kerja asing terampil menawarkan inovasi melalui bakat yang mereka miliki. **Regulasi di Indonesia membatasi jumlah tenaga kerja terampil asing serta biaya untuk mempekerjakan mereka juga mahal.**

Di Indonesia terdapat 1 tenaga kerja asing untuk setiap 763 tenaga kerja lokal, dibandingkan dengan …

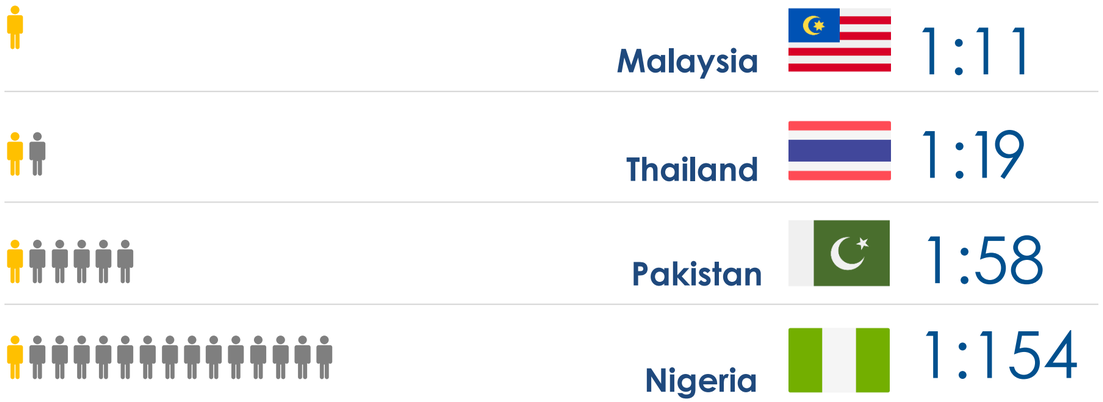

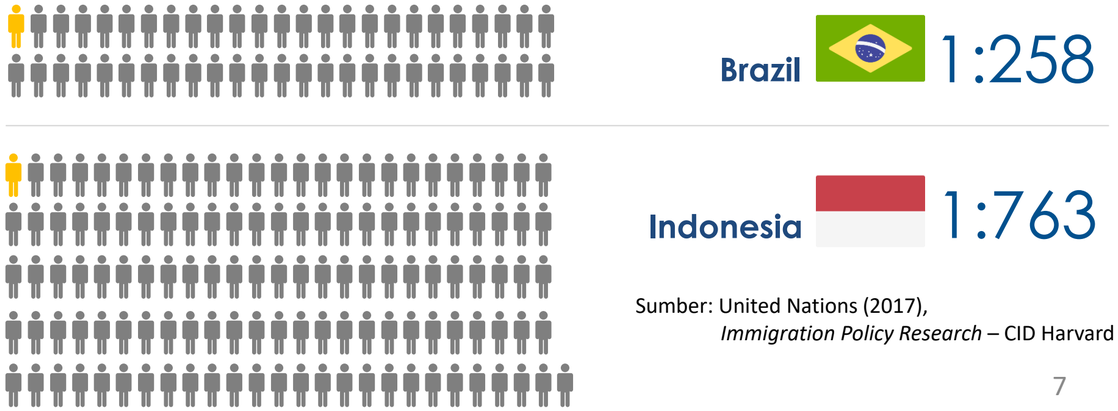

Sumber: United Nations (2017),
Immigration Policy Research – CID Harvard (2017)

REGULASI INVESTASI

Pembatasan terhadap investasi asing langsung (FDI) **mencegah terbentuknya bisnis di Indonesia yang dapat menarik teknologi dan mendorong ekspor.**

Stok investasi langsung Indonesia hanya **22,1%** dari PDB pada tahun 2018, dibandingkan…

25,1%	43,0%	45,7%	60,1%
Filipina	Malaysia	Thailand	Vietnam

Sumber: *Country Fact Sheets* 2019 – UNCTAD

Sementara itu, net investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar

2,1% dari PDB, dibandingkan...

3,2%	3,0%	1,8%	4,3%
Filipina	Malaysia	Thailand	Vietnam

Sumber: World Development Indicators (2017)

Pembatasan terhadap investasi asing mengakibatkan **hilangnya 8% investasi berorientasi ekspor yang masuk ke Indonesia.**

Dampak lain dari pembatasan investasi asing adalah **rendahnya upah tenaga kerja Indonesia sebesar 15% dari yang seharusnya.**

Sumber: *Indonesia Economic Quarterly* (IEQ) World Bank, Desember 2018

Regulasi investasi sektor jasa di Indonesia **lebih restriktif dibandingkan rata-rata negara G20.**

Regulasi investasi Indonesia di **21 dari 22 subsektor jasa** lebih restriktif dari rata-rata negara G20.

5 subsektor [*legal, distribution (wholesale, retail services), logistics - freight transport, construction, maritime transport*] Indonesia memiliki regulasi yang **paling restriktif.**

Sumber: *Services Trade Restrictiveness Index* 2018 - OECD

Contoh sukses relaksasi peraturan investasi:

Relaksasi DNI industri film pada tahun 2016 berdampak pada semakin **berkembangnya produsen film domestik, munculnya 600 layar bioskop baru,** dan **meningkatnya jumlah penonton sebesar 200%** dalam tiga tahun.

Sumber: Bloomberg (2019)

REGULASI PERDAGANGAN

Eksportir dan importir menghadapi tingginya biaya administrasi yang disebabkan oleh perizinan dan regulasi.
Perdagangan internasional bernilai kurang dari 40% dari Pendapatan Domestik Bruto, terendah sejak awal 1970an.

Perusahaan Indonesia membutuhkan waktu **4,5 hari** untuk menyelesaikan **pengecekan kepabeanan dan dokumen dalam mengekspor barang** dibandingkan dengan...

Singapura	Malaysia	Thailand
0,5 hari	1,6 hari	2,3 hari

Dengan **biaya lebih tinggi (mahal)** dari negara tersebut sebesar:

Singapura	Malaysia	Thailand
USD 20,5	USD 144,5	USD 72,5

Sementara itu, dibutuhkan **8,6 hari** untuk **menyelesaikan proses impor** di Indonesia, dibandingkan dengan...

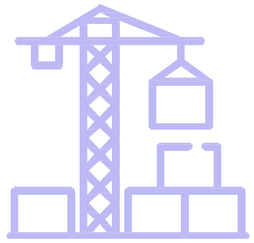

Singapura	Malaysia	Thailand
1,5 hari	1,8 hari	2,3 hari

Dengan **biaya lebih tinggi (mahal)** dari negara tersebut sebesar:

Singapura	Malaysia	Thailand
USD 287	USD 274	USD 271

Sumber: Trading across Borders - Ease of Doing Business (EoDB) 2019, diolah

"Hambatan non-tarif" berdampak pada peningkatan biaya hidup di Indonesia sebesar **8%**.

Nilai tersebut setara pajak sejumlah Rp3.000.000 per tahun untuk setiap rumah tangga.

Sumber: *Non-Tariff Trade Regulations in Indonesia: Measurement of their Economic Impact* – Mark (2015), diolah

INSTITUSI

Permasalahan bidang tenaga kerja, investasi, dan perdagangan di Indonesia **berakar dari lemahnya tata kelola pemerintahan dan institusi.**

Korupsi dan birokrasi yang tidak efisien dianggap sebagai **faktor paling bermasalah** dalam berbisnis di Indonesia.

Sumber: World Economic Forum (WEF) *Executive Opinion Survey* 2017

"Dalam setahun terakhir, saya mendapatkan tiga pelatihan tentang *packaging* dari tiga kementerian/lembaga yang berbeda."

- Pelaku Usaha Kecil

Lemahnya koordinasi antara pemerintah, baik di tingkat pusat maupun antara pusat dan daerah.

Perencanaan dan penganggaran kurang sinkron, serta implementasi kebijakan kurang kuat	**Perencanaan pembangunan antar K/L, serta antara pusat dan daerah tidak sinkron, misalnya pembangunan pelabuhan yang tidak disertai perbaikan akses jalan dari dan menuju pelabuhan.**	**Kualitas jalan di daerah yang buruk karena beda kewenangan pembangunan jalan (pusat, provinsi, kabupaten/kota).**	**Intervensi untuk UKM dilakukan oleh lebih dari satu K/L.**

Sumber: Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) internal Bappenas dan FGD dengan pelaku usaha

PENGHAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI JANGKA MENENGAH-PANJANG

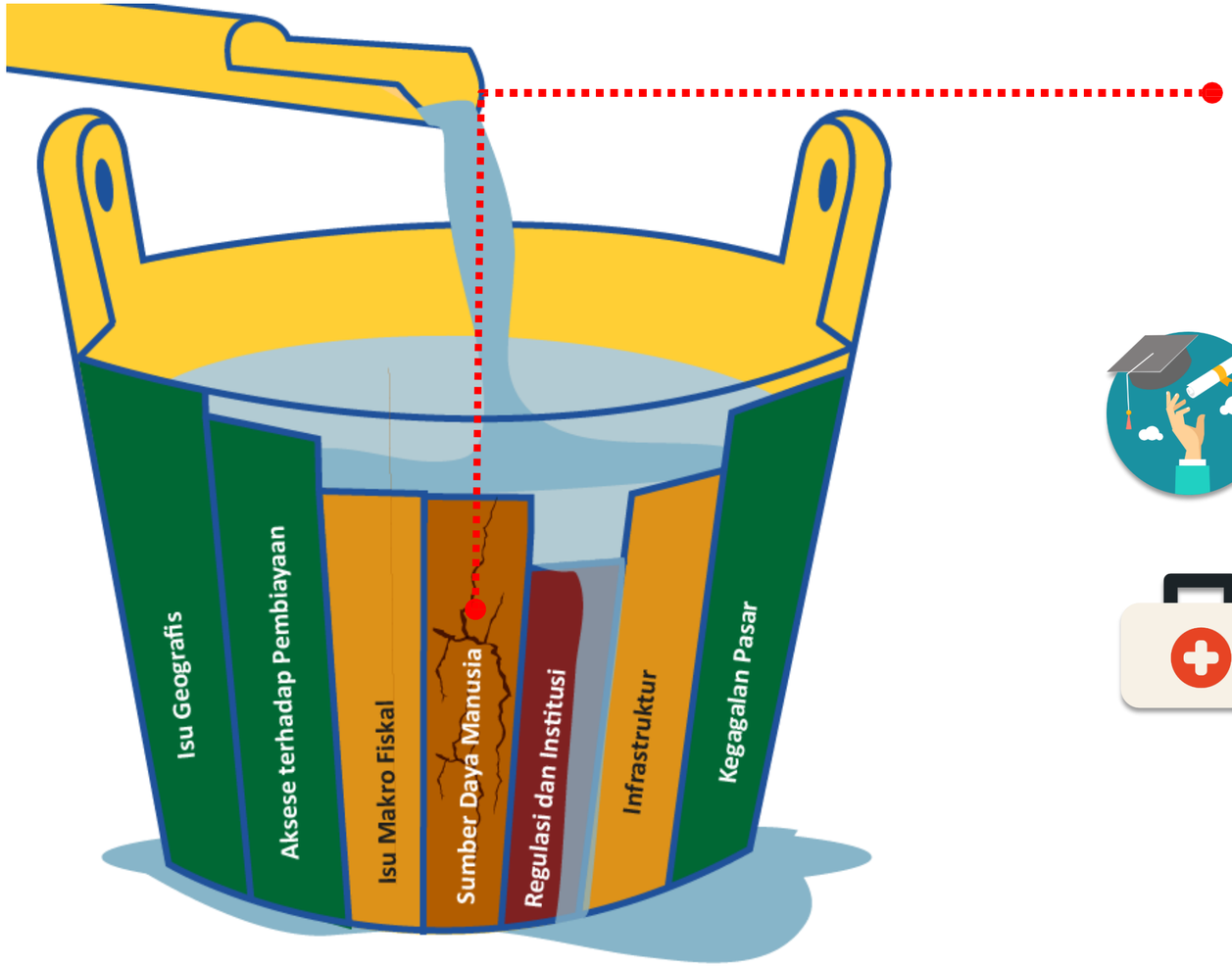

Penghambat Utama Pertumbuhan Ekonomi

Selain isu regulasi dan institusi, aspek **Sumber Daya Manusia** perlu diperbaiki mulai dari sekarang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka menengah panjang.

Pendidikan

- Kualitas pendidikan rendah

Kesehatan

- Kesehatan dan gizi anak rendah
- Prevalensi penyakit tidak menular tinggi
- Prevalensi merokok tinggi

SUMBER DAYA MANUSIA: PENDIDIKAN

Tingkat partisipasi sekolah di Indonesia tinggi, **namun kualitas pendidikan masih sangat rendah.**

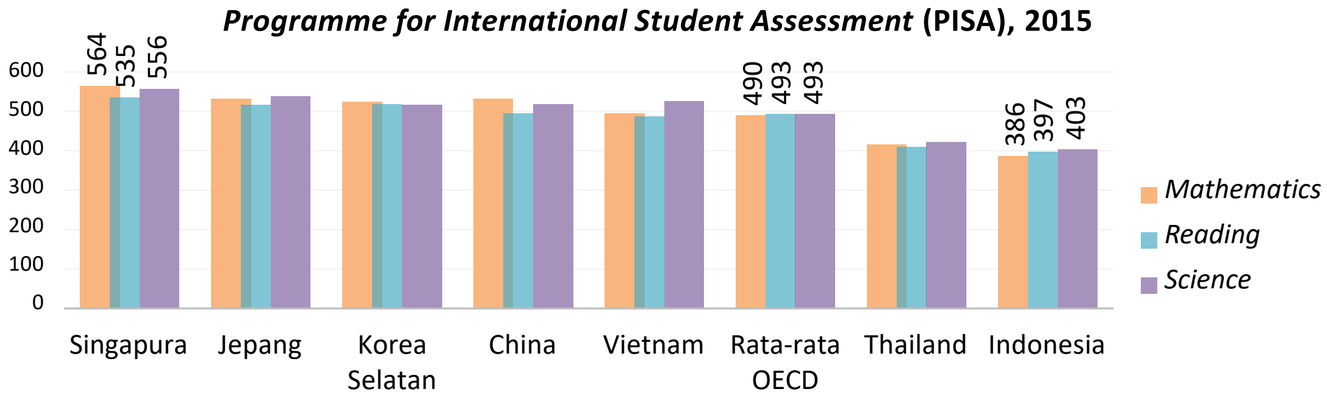

Berdasarkan skor PISA 2015, kemampuan matematika, membaca, dan sains pelajar Indonesia **tertinggal jauh** dari negara tetangga dan rata-rata negara OECD.

Sumber: PISA, OECD (2016)

Akibatnya**, keahlian dasar tenaga kerja di Indonesia sangat rendah.**

Sebagai perbandingan, keahlian tenaga kerja lulusan **Pendidikan Tinggi di Indonesia** setara keahlian tenaga kerja lulusan **SMA ke bawah di Denmark**.

Sumber: *The Need for a Pivot to Learning: New Data on Adult Skills from Indonesia* - Pritchett (2016)

Berdasarkan hasil historis PISA, peningkatan kualitas pendidikan Indonesia sangat lambat.

Diperkirakan **Indonesia baru dapat mencapai skor rata-rata OECD pada tahun 2065.**

Sumber: *LEARNING to Realize Education's Promise* – World Development Report (WDR) 2018, World Bank

Peningkatan skor PISA setiap pelajar menjadi rata-rata **420 atau setara Thailand saat ini** akan meningkatkan **0,6% pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia** selama 2020-2060 dari *baseline.*

Sumber: OECD Economic Surveys Indonesia, Oktober 2018

SUMBER DAYA MANUSIA: KESEHATAN

Meskipun mengalami perbaikan signifikan seperti peningkatan usia harapan hidup, **beberapa capaian indikator kesehatan Indonesia masih rendah dan tertinggal** dibandingkan negara sebanding. Hal ini berpengaruh pada **produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang**.

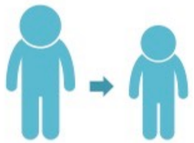

3 dari 10 anak di bawah usia 5 tahun **menderita *stunting***

Sumber: UNICEF, WHO (2016)

75

99

97

Hanya **75 dari 100** anak Indonesia mendapat **imunisasi campak**

23 dari 100 remaja laki-laki usia 13-15 tahun **merokok**

Sumber: WHO (2018), diolah

26 dari 100 kematian penduduk usia 30-70 tahun disebabkan oleh **4 penyakit tidak menular**: kanker, diabetes, kardiovaskular (CVD), atau pernafasan kronis (CRD) dibandingkan...

17

di Malaysia, Vietnam, dan China

15

di Thailand

Sumber: World Development Indicators (2016), diolah

Fasilitas kesehatan Indonesia masih sangat tertinggal:

Tenaga Kesehatan
per 10.000 Penduduk*

3,7	15,1	8,2	8,1

Tempat Tidur Rumah Sakit
per 10.000 Penduduk**

12	19	26	21

Sumber: WHO
*Indonesia & Thailand (2017), Vietnam (2016), Malaysia (2015)

Sumber: World Development Indicators
**Indonesia & Malaysia (2015), Vietnam (2014), Thailand (2010)

KARAKTER BANGSA

Melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya pelindungan hak kebudayaan

- Globalisasi dan pertukaran budaya global menjadi tantangan

Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan

- Dari 3,3 juta pengguna narkoba, 810.267 pelajar (24%) (BNN, 2017)

Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama

- Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami penurunan dari 75,36 pada tahun 2015 menjadi 70,90 pada 2018.

Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa

- Masih tingginya angka perkawinan anak 11,2 persen (Susenas 2018).

Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia

- Kontribusi ekspor ekonomi budaya terhadap total ekspor nasional masih rendah yaitu sebesar 13,77 persen (2016)

Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

- Masyarakat membaca surat kabar/majalah 13,11%, artikel/ berita elektronik 18,89% (Susenas MSBP 2015)

INFRASTRUKTUR
Infrastruktur Masih Terbatas

Kementerian PPN/ Bappenas

PENURUNAN STOK INFRASTRUKTUR TERHADAP PDB

laju penurunan melambat, meningkat secara nominal

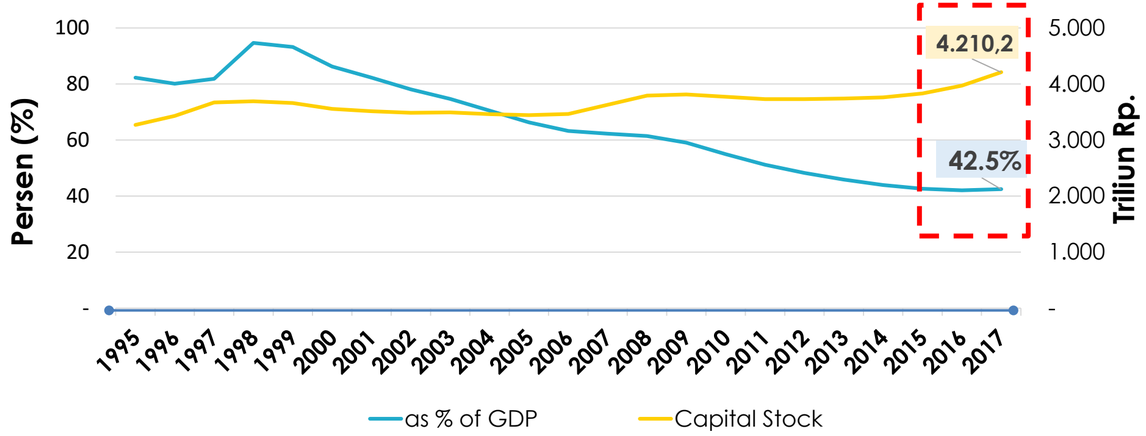

Berdasarkan Persentase PDB (LHS) dan Rp triliun (RHS)

Sumber: Prospera

BIAYA LOGISTIK MASIH TINGGI

Biaya logistik (persentase terhadap PDB)

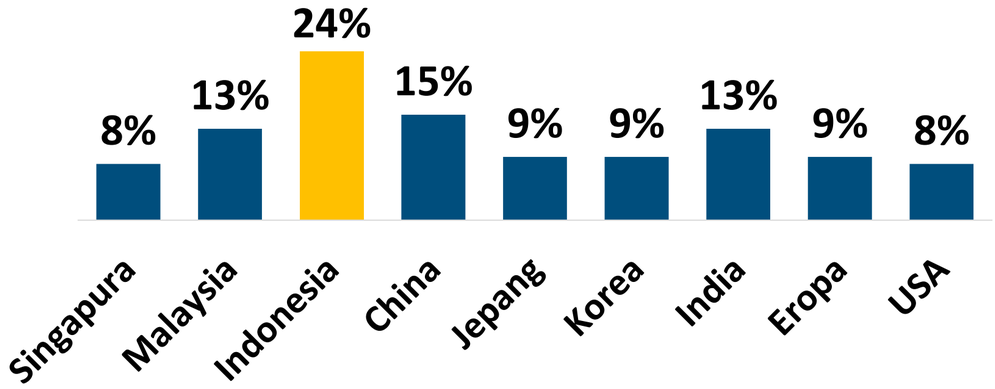

STOK INFRASTRUKTUR DI BAWAH RATA-RATA INTERNASIONAL

43% vs rata-rata 70%

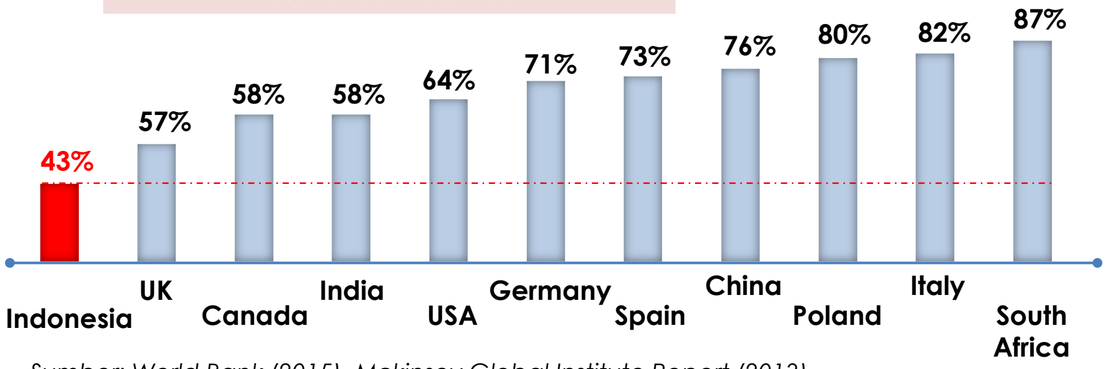

Sumber: World Bank (2015), Mckinsey Global Institute Report (2013)

KINERJA INFRASTRUKTUR LOGISTIK MASIH RENDAH

Peringkat infrastruktur logistik

Sumber: Logistic Performance Index, World Bank (2018)

KEWILAYAHAN

KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH

- Konsentrasi kegiatan ekonomi masih terpusat di KBI terutama Pulau Jawa

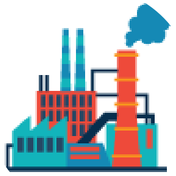

PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

- Tingkat keberhasilan pusat pertumbuhan baru yang rendah akibat konektivitas yang belum optimal

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

- Akses dan kualitas pelayanan dasar yang masih terbatas
- Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi
- Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi

PENGELOLAAN URBANISASI

- Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 1,4% PDB. Bandingkan dengan Cina dan Negara Asia Timur dan Pasifik lain yang rerata mencapai 2,7% PDB)

PEMANFAATAN RUANG

- Pemanfaatan ruang belum sesuai dengan peruntukannya menyebabkan terjadinya korban bencana alam dan hambatan pembangunan infrastruktur.

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DAN KETIMPANGAN PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

- Cakupan bidang tanah bersertifikat yang masih rendah dan ketimpangan kepemilikan lahan antara rumah tangga tani dan pemilik lahan.

FUNGSI IBUKOTA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN

- Dominasi wilayah metropolitan Jakarta dalam perekonomian nasional dan tingginya *gap* dengan daerah lain di Indonesia (kontribusi wilayah metropolitan Jakarta 20,85% nasional, Jawa 58,49 % dari PDB Nasional (BPS, 2018),

LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA

Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun. Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi

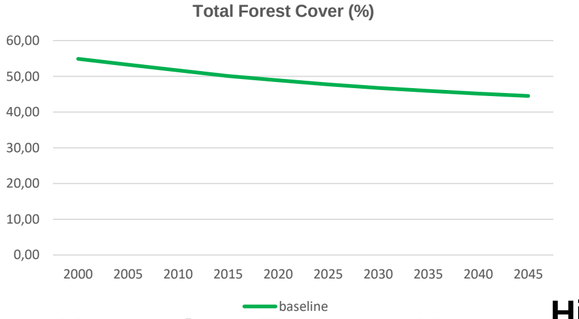

Kerusakan Tutupan Hutan

Jumlah tutupan hutan terus berkurang hingga di bawah 50 persen dari total luas wilayah Indonesia

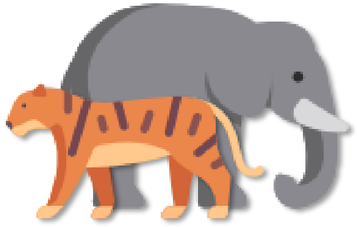

Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Kerusakan habitat, perburuan liar, dan masuknya jenis asing invasif meningkatkan risiko kepunahan

Kelangkaan Air

Khususnya di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara semakin meluas. Proporsi wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di 2045

Kelangkaan Energi

Masih sangat bergantung pada sumber energi fosil yang tinggi emisi dan suatu saat akan habis

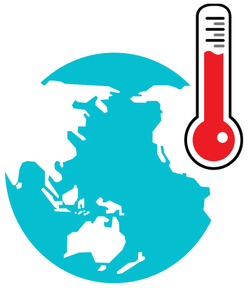

Kenaikan Suhu Global

Laporan PBB: 2018 merupakan tahun keempat terpanas sepanjang sejarah bumi

Cuaca Ekstrim

Kondisi cuaca ekstrim terus terjadi, meningkatkan potensi bencana dan bahaya terhadap transportasi

Pesisir Rentan

terhadap dampak perubahan iklim meningkat hingga 18.480 KM di tahun 2045. Luas *coral reef* berkurang 90% di tahun 2045 bila suhu naik 1.5 C (IPCC, 2018)

Ancaman Bencana

Tingkat risiko bencana di Indonesia sangat tinggi. Mayoritas pemukiman dan infrastruktur dibangun di area rawan bencana

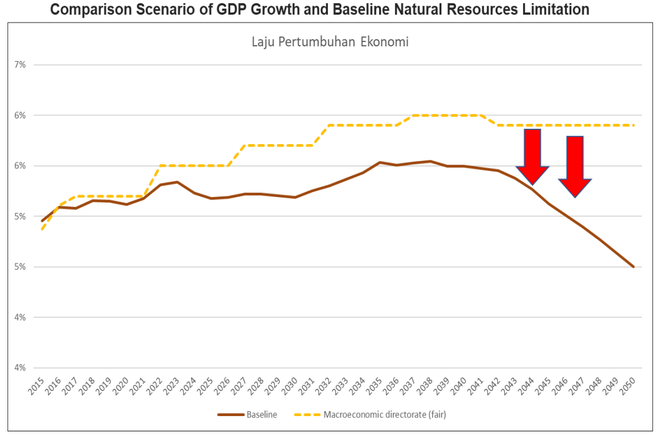

Kerugian Ekonomi

akibat kerusakan lingkungan hidup serta dampak bencana diproyeksi menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional

POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Belum Kokoh Kelembagaan Demokrasi

1

- Biaya politik tinggi; dan
- Partisipasi politik belum optimal.

Belum Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri

2

- Melemahnya multilateralisme dan menguatnya unilateralisme
- Terbatasnya pelibatan peran *non-state actors* dalam KPI.

Belum Optimalnya Penegakan Hukum

3

- *Overcrowding* Lapas dan Rutan sebesar 208%
- Rendahnya peringkat aspek penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit. (EoDB Index, 2019)

Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Birokrasi dan Pelayanan Publik

4

- Rendahnya *skill* ASN;
- Kelembagaan belum efektif dan akuntabel;
- Kualitas pelayanan publik belum merata.

Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Birokrasi dan Pelayanan Publik

5

- Maraknya serangan siber berbasis *malware*
- Perlombaan teknologi persenjataan-*hybrid warfare;*
- Kejahatan transnasional;
- Sengketa perbatasan.

SKENARIO DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 5 TAHUN KE DEPAN

SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI 2020-2024

Kunci peningkatan pertumbuhan[1]:
1. Peningkatan produktivitas
2. Peningkatan investasi
3. Perbaikan kualitas SDM
4. Perbaikan pasar tenaga kerja

Kementerian PPN/ Bappenas

Pertumbuhan Ekonomi - Persen
(GNI Per Kapita – USD Harga Berlaku *Atlas Method*[2])

Indonesia akan menjadi *upper middle income* pada tahun 2019

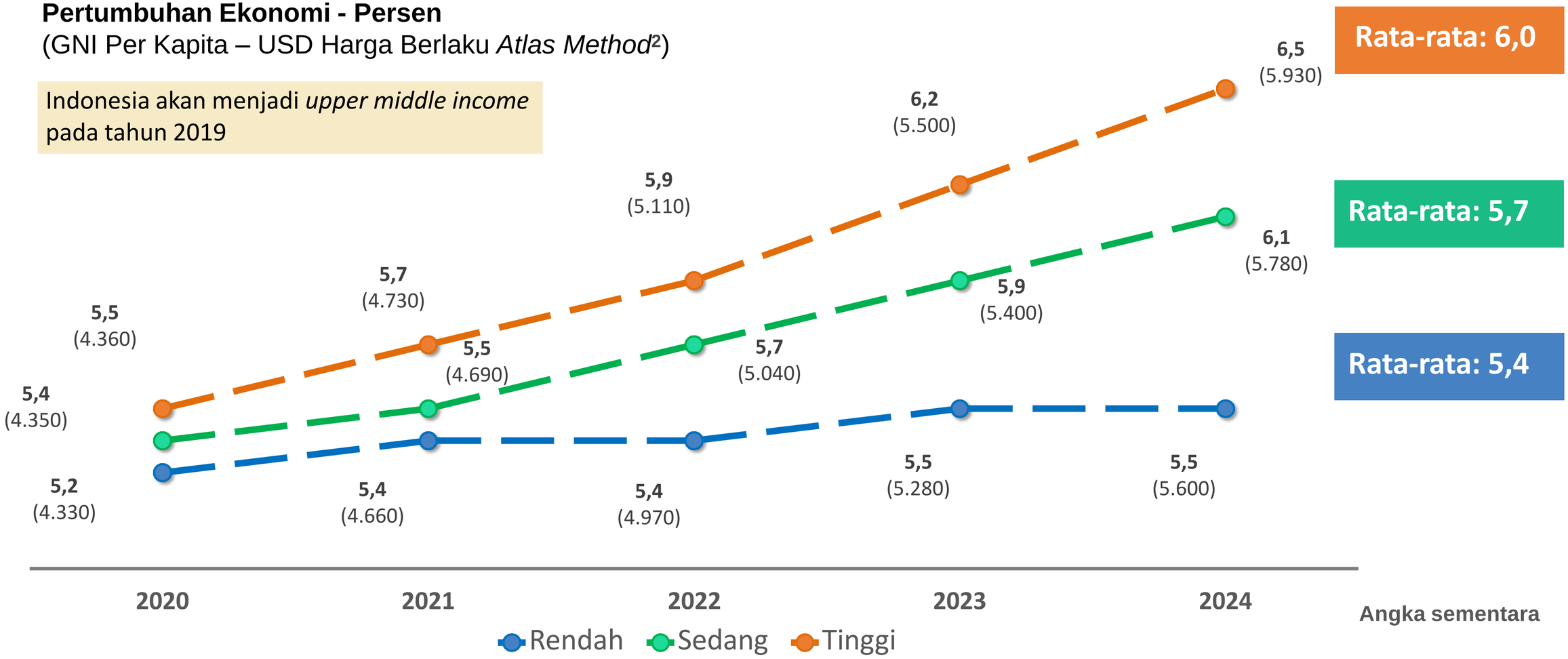

Angka sementara

1 *Berdasarkan simulasi Bappenas Juni 2019 (Angka Sementara) dengan metode Growth Accounting*
2 *Metode yang digunakan oleh Bank Dunia untuk mengelompokkan negara berdasarkan pendapatan*

GAMBARAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2020 - 2024

Kementerian PPN/ Bappenas

PDB SISI PRODUKSI

RATA-RATA 2020-2024
SKENARIO RENDAH DAN TINGGI
(persen/tahun)

- **Industri:** 5,3 – 7,0
- **Pertanian:** 3,8 – 3,9
- **Pertambangan:** 1,7 – 1,9
- **Listrik:** 4,4 – 4,8
- **Konstruksi:** 5,8 – 6,2
- **Transportasi:** 7,2 – 7,3
- **Infokom:** 7,4 – 8,2
- **Jasa Keuangan:** 6,3 – 7,2
- **Perdagangan:** 5,5 – 6,2

PERTUMBUHAN EKONOMI

5,4 – 6,0

Perhitungan Bappenas
(sangat sementara)

PDB SISI PENGELUARAN

- **Konsumsi RT & LNPRT:** 5,1 – 5,3
- **Konsumsi Pemerintah:** 4,8 – 5,8
- **Investasi:** 7,3 – 8,0
- **Ekspor:** 5,3 – 7,7
- **Impor:** 5,6 – 7,2

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024

Kementerian PPN/ Bappenas

Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,4 - 6,0
Tingkat Kemiskinan (persen)	6,5 – 7,0
Gini Rasio (indeks)	0,370 – 0,374
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	4,0-4,6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	75,54

7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

Kementerian PPN/ Bappenas

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan RPJMN 2020-2024 disusun dengan memperkuat implementasi *Money Follows Program* dengan 3 strategi utama *:*

1 Memperkuat kualitas alokasi pada Prioritas

- Memperkuat integrasi pendanaan untuk prioritas
- Fokus pada pendanaan prioritas khususnya *Major Project*

2 Memperbesar Kapasitas Pendanaan

- Diperkirakan Belanja K/L hanya dapat mendanai 20-25% seluruh kebutuhan pembangunan
- Mendorong peran BUMN, KPBU,dan Masyarakat
- Mendorong inovasi skema pendanaan (*creative financing*) antara lain PINA, *Blended Finance serta Output Based Transfer/*Hibah ke daerah

3 Memperkuat *Delivery Mechanism*

- Menyusun rencana program pembangunan hingga tingkat proyek dan *Major Project* sebagai alat kendali

MAJOR PROJECT

- Pelaksanaan RT RPJMN 2020-2020 diperkuat dengan penyusunan *Major Project 2020-2024* untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*)
- *Major Project* memuat proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan K/L; Pusat – Daerah – BUMN – Masyarakat

MAJOR PROJECT a.l.

Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan *Stunting*

Penyelesaian Kawasan Pariwisata (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, dan Wakatobi)

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Pembangunan Tol Sumatera & Trans Papua

Pengembangan Wilayah Metropolitan (Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar)

38 ***Major Projects*** disusun memiliki **Nilai Strategis** dan **Daya Ungkit** Untuk Mencapai Sasaran Prioritas

KERANGKA REGULASI & KELEMBAGAAN DALAM RPJMN 2020-2024

Kementerian PPN/ Bappenas

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITUJUKAN UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

NO.	AGENDA PRORITAS PEMBANGUNAN	KERANGKA REGULASI (TINGKAT UU)	KERANGKA KELEMBAGAAN
1	Manusia	12	3
2	Ekonomi	11	6
3	Kewilayahan	5	2
4	Infrastruktur	1	1
5	Politik, Hukum, dan Pertahanan	20	5
	TOTAL	49	17

BEBERAPA ISU PRIORITAS	KERANGKA REGULASI & KELEMBAGAAN
Infrastruktur	Regulasi dan/atau kelembagaan mendukung Isu Infrastruktur
Vokasi	Regulasi dan/atau kelembagaan mendukung Isu Vokasi
Ibu dan Anak serta Stunting	Regulasi mendukung Isu Ibu dan Anak serta *Stunting*
Investasi dan Regulasi Perizinan	Regulasi dan/atau kelembagaan mendukung Isu Investasi dan Perizinan
Reformasi Birokrasi	Regulasi mendukung Isu Birokrasi
Low Carbon Development Indonesia (LCDI) dan Kebencanaan	Regulasi mendukung Isu LCDI dan Kebencanaan

PENUTUP

Kementerian/Lembaga agar menggunakan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Teknokratis Renstra K/L

Kesepakatan/masukan dalam Konsultasi Pusat dan Konsultasi Regional dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menjadi masukan untuk penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024

Sebagai Rangkaian dari konsultasi ini, akan dilakukan serangkaian Konsultasi Regional dengan Daerah (untuk 6 pulau besar) dan masyarakat (*Civil Society*)

TERIMA KASIH

LAMPIRAN

HIGHLIGHTS PEMETAAN VISI-MISI PRESIDEN DALAM RPJMN 2020-2024

VISI 1 PRESIDEN:

"..Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Menghubungkan Kawasan Industri Kecil, Ekonomi, Pariwisata, Persawahan, Perkebunan, Tambak Perikanan.."

Kementerian PPN/ Bappenas

PEMBANGUNAN TOL LAUT, JEMBATAN UDARA, DAN JALAN TRANS PAPUA

Mendukung lumbung pangan nasional dan sentra industri kecil dan *food estate* di Merauke

PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN NASIONAL MERAUKE
(Inpres 9/2017 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat)

KONEKTIVITAS MENDUKUNG PARIWISATA

Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, Bandara Sam Ratulangi, dan jalan akses bandara mendukung Pariwisata Likupang

PALAPA RING

Tergelarnya Palapa Ring mendukung pemanfaatan teknologi digital di Industri Kecil dan Menengah (IKM) menuju *IKM Go-Digital*

INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Pembangunan waduk dan air baku di wilayah timur mendukung pengembangan KEK Sorong dan irigasi untuk perkebunan, persawahan, perikanan, dan tambak

VOLUME TOTAL
BENDUNGAN 196.85 Juta m3

- IRIGASI 20377 Hektare
- LISTRIK 6.56 MW
- AIR BAKU 1.304 m3/detik
- REDUKSI BANJIR 6.56 m3/detik

VISI 2 PRESIDEN:

“Pembangunan SDM dengan Menjamin Kesehatan Ibu Hamil, Kesehatan Bayi, Kesehatan Balita, Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Mengurangi Stunting, Kematian Ibu, Kematian Bayi...”

Kementerian PPN/ Bappenas

STRATEGI KEBIJAKAN

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak

1. **Pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan** dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan
2. Perluasan dan pengembangan **imunisasi dasar lengkap**
3. Peningkatan **gizi remaja putri dan ibu hamil**
4. Perluasan akses dan kualitas **pelayanan KB dan kesehatan reproduksi**

2. Percepatan penurunan stunting

Peningkatan **efektivitas intervensi spesifik**, serta **perluasan dan penajaman intervensi sensitif** secara terintegrasi

3. Penguatan sistem kesehatan

1. Penguatan **pelayanan kesehatan dasar dan rujukan**
2. Pemenuhan dan peningkatan **kompetensi tenaga kesehatan**
3. Pemenuhan sediaan **farmasi dan alat kesehatan**

PROGAM, KEGIATAN DAN PROYEK PRIORITAS

Program Prioritas:
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

1

Peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB, dan kesehatan reproduksi

- Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
- Peningkatan Kesehatan Reproduksi

2

Percepatan perbaikan gizi masyarakat

- Penurunan *stunting*
- Konseling pengasuhan
- Akses air minum dan sanitasi layak

3

Penguatan Pelayanan Kesehatan

- Imunisasi
- Obat dan perbekalan kesehatan
- Pelatihan dan penugasan khusus tenaga kesehatan

Kabupaten/Kota Lokus Prioritas Penurunan Stunting Terintegrasi

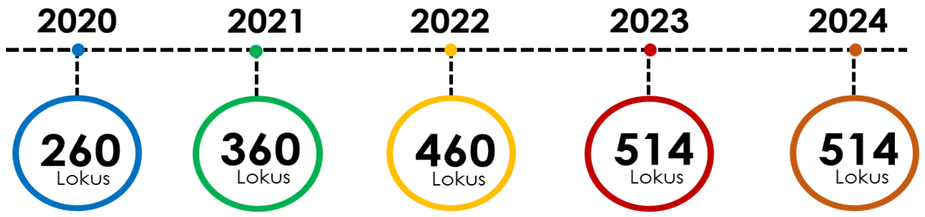

VISI 2 PRESIDEN:
"Membangun SDM dengan meningkatkan *vocational training, vocational school*"

Kementerian PPN/ Bappenas

Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)

Pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)

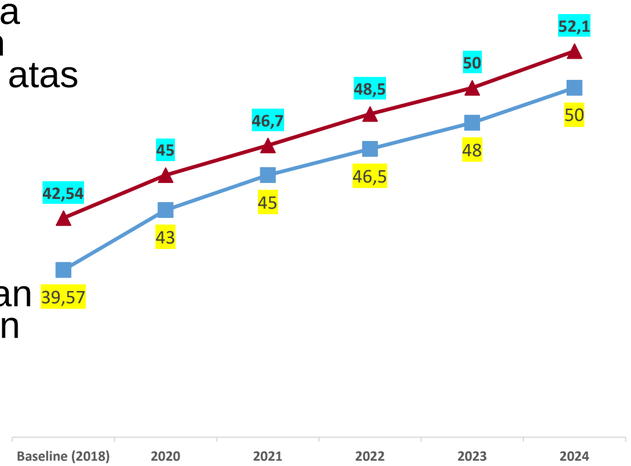

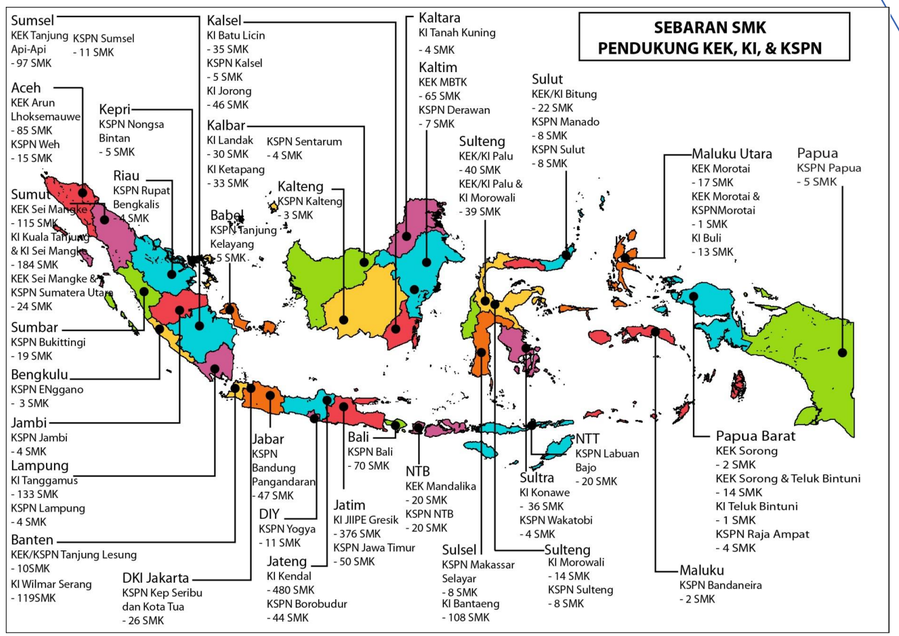

Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- Sistem insentif/regulasi untuk industri
- Pemetaan kebutuhan dan pengembangan bidang keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja

Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- Penyelarasan kurikulum, model pembelajaran, prodi sesuai kebutuhan industri;
- *dual* TVET, *teaching factory* dan pemagangan;
- Penguatan *softskills* dan pembelajaran bahasa asing;
- kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren;
- pemagangan guru/instruktur di industri, instruktur/praktisi dari industri

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri

Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- Pengendalian satuan pendidikan dan program studi vokasi baru
- Peningkatan akreditasi
- Skema pendanaan peningkatan keahlian
- Fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/*teaching factory/teaching industry*
- Pembentukan Komite TVET

Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi

- Standar kompetensi berdasarkan okupasi yang mengacu standar internasional, dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor
- Penguatan lembaga sertifikasi profesi

VISI 3 PRESIDEN:

“Mengundang Investasi yang Seluas-luasnya untuk Membuka Lapangan Pekerjaan...Memangkas Hambatan Investasi, Perizinan yang Lambat, Pungli...”

Kementerian PPN/ Bappenas

1 Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi

- Kegiatan terkait : Rencana Aksi Peningkatan Peringkat EODB, Koordinasi Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Nasional,
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi, PTSP Prov DKI, PTSP Kota Surabaya

- Kegiatan terkait : Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi, Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi, PTSP Daerah, Kemendagri

2 Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi

- Kegiatan terkait : Evaluasi dan Monitoring Implementasi Peraturan DNI
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait yang sektornya masuk dalam DNI

- Kegiatan terkait : Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBTSE), Pengembangan SPBTSE, Implementasi SPBTSE, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi sesuai PP 24 Tahun 2018 tentang Kemudahan Berusaha Terintegrasi Secara Elektrionik PTSP daerah, Kemendagri

- Kegiatan terkait : Pemanfaatan tax holiday tax allowance
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, K/L terkait perizinan investasi

3 Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif

- Kegiatan terkait : Penataan regulasi ketenagakerjaan
- K/L terkait : Kemenaker, Kemenko Perekonomian, Kemendagri

VISI 4 PRESIDEN:

“Mereformasi Birokrasi...Reformasi Struktural Agar Lembaga Semakin Sederhana, Semakin Simple, Semakin Lincah, Mengubah *Mindset*,...Kecepatan Melayani, Kecepatan Memberi Izin...”

Kementerian PPN/ Bappenas

Arahan Presiden:

1. Penyederhaan perizinan
2. Penataan struktur kelembagaan birokrasi

Akar Permasalahan Pembangunan:

Iklim investasi dan ekspor yang belum kondusif disebabkan oleh regulasi dan kebijakan

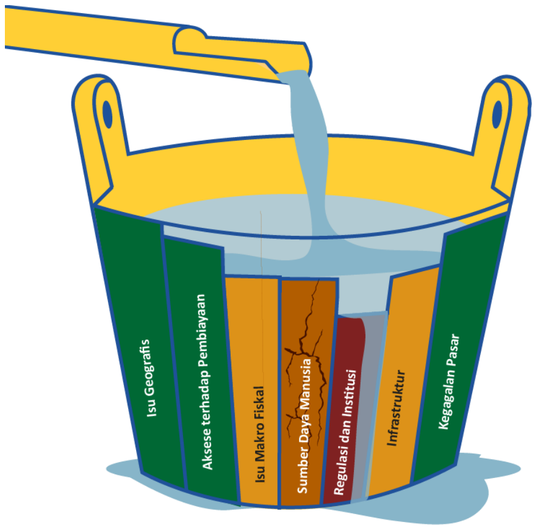

Hasil *Growth Diagnostic:*

Kualitas institusi rendah

1. Korupsi tinggi dan birokrasi tidak efisien
2. Lemahnya koordinasi antarkebijakan

Arah Kebijakan:

Penerapan *e-service* pada sektor pelayanan perizinan

Perluasan pelayanan terpadu pada sektor perizinan

Pembangunan Zona Integritas pada unit pelayanan perizinan

Penataan koordinasi K/L yang menangani perizinan sektoral

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Pemindahan Ibu Kota mendorong pemerataan ke luar Jawa dan mengubah *mindset* Java Centris

Struktur Perekonomian Indonesia secara Spasial 2017

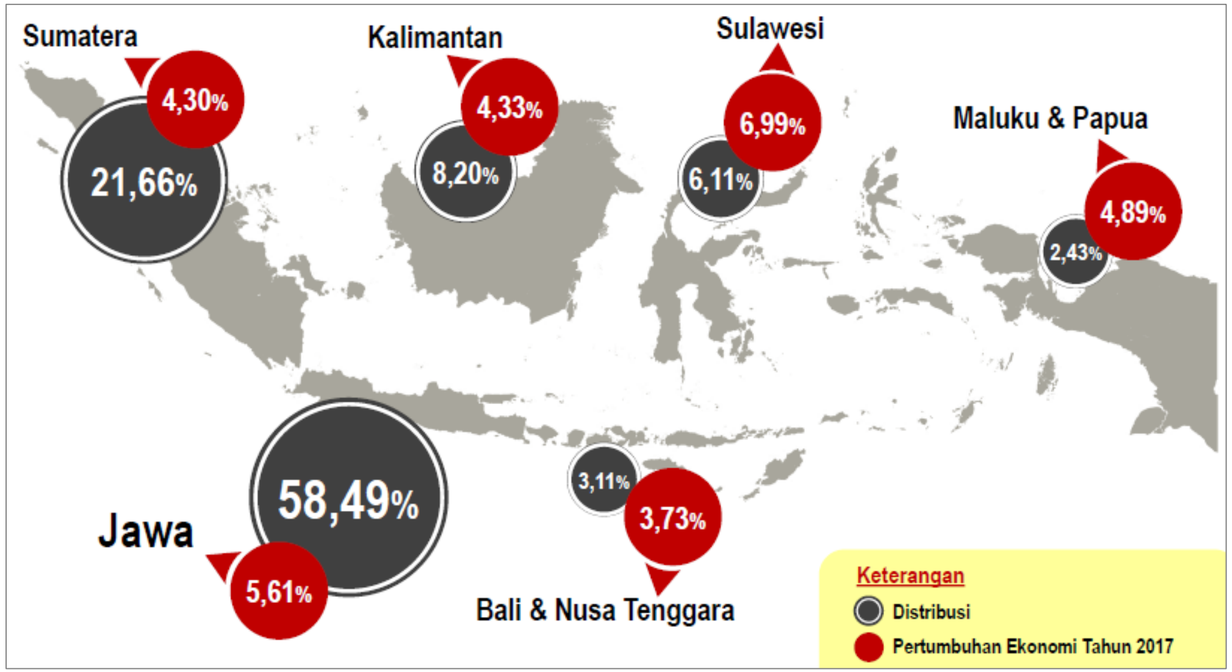

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Keunggulan:

+ Mengurangi beban Jabodetabek dan pulau Jawa
+ Memberikan *equal* akses bagi seluruh wilayah NKRI
+ Mendorong pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah, Contoh: Brasillia (Brazil); Sejong (Korsel); Naypidyaw (Myanmar); Astana (Kazakhstan);
+ Merubah *mindset* orientasi pembangunan dari Java Centris ke Indonesia Centris
+ Ketersedian lahan luas, dapat Membangun Ibu Kota, dengan konsep 60% wilayah terbangun dan 40% kawasan hijau kota.

Kelemahan:

– Membutuhkan biaya yang cukup besar
– Dalam jangka pendek, kemungkinan sebagian keluarga ASN Pusat akan tetap di Jakarta